

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Struktur ekonomi menggambarkan susunan sektor-sektor yang membentuk perekonomian pada suatu negara. Struktur ekonomi mencerminkan penerapan sistem ekonomi yang bertujuan mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan nasional. Wade (dalam Firmansyah *et al.*, 2024) menyatakan bahwa perubahan struktur ekonomi merupakan fenomena penting yang memengaruhi dinamika perekonomian. Proses ini terkait dengan pergeseran kontribusi potensi sektor-sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja, yang dipengaruhi oleh perubahan pola permintaan serta kemajuan teknologi. Pemahaman mengenai perubahan struktur ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan ekonomi dan strategi perencanaan yang efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi modern.

Analisis struktur ekonomi sangat penting dilakukan untuk membantu memahami dinamika perekonomian suatu wilayah dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Dengan menganalisis struktur ekonomi, dapat diidentifikasi sektor-sektor dominan yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta daya saing wilayah. Hal ini memberikan dukungan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mendorong transformasi dari sektor tradisional ke sektor modern.

Untuk mengkaji fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini melihat teori perubahan struktur ekonomi dari Hollis Chenery (1975), yang menjelaskan bahwa proses transformasi ekonomi di negara-negara berkembang ditandai dengan pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor primer seperti pertanian menuju sektor sekunder yang meliputi industri, serta sektor tersier berupa jasa. Pergeseran ini biasanya terjadi bersamaan dengan kenaikan pendapatan per kapita, pertumbuhan urbanisasi, dan akumulasi modal. Sehingga dalam konteks pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, teori ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana komposisi sektor ekonomi di Kabupaten Malinau, Bulungan, Tana Tidung, Nunukan, dan Kota Tarakan mengalami perubahan sebelum dan sesudah pemekaran.

Pembangunan ekonomi merupakan fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu negara dan wilayah. Pembangunan ekonomi memiliki beberapa peranan yang krusial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memajukan suatu negara. Pembangunan ekonomi harus dilakukan terencana dengan matang dan berorientasi pada keberlanjutan, menciptakan akses yang inklusif dengan peluang yang merata bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi disparitas antar kelompok dan wilayah.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mengatur proses pemekaran daerah, dengan tujuan meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Regulasi ini dilakukan untuk memperketat persyaratan bagi daerah yang mengajukan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Peraturan Pemerintah tersebut

menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. (Pemerintah Republik Indonesia, 2000). Di sisi lain, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan undang-undang utama yang mengatur pemekaran daerah di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan menjadi dasar hukum terbaru dalam proses pembentukan, pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah otonom di Indonesia. Kedua regulasi ini saling melengkapi dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan pemekaran daerah dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Pemekaran wilayah seringkali diajukan sebagai kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan publik di daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efisiensi pelayanan, penguatan partisipasi demokratis, serta optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi dan sosial secara lebih efektif (Suherman dan Maryani, 2024). Pemekaran wilayah dirancang untuk mendekatkan jarak kendali pemerintahan, mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah, dan mewujudkan perekonomian wilayah yang tangguh demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, diharapkan pemekaran mampu mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat, membuka peluang baru bagi pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan intensitas penerapan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai pulau terbesar ketiga di dunia sesudah Greenland dan Papua, Kalimantan memegang peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi

wilayah Kalimantan, yang meliputi seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di dalamnya, menduduki peringkat ketiga secara nasional sesudah Pulau Jawa dan Sumatra. Posisi ini menegaskan pentingnya Kalimantan sebagai salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi Indonesia. Kalimantan sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Kekayaan sumber daya alam serta letak geografis yang mendukung perdagangan, menjadikan Kalimantan sebagai wilayah dengan potensi ekonomi yang besar.

Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada 16 November 2012. Pengesahan undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan yang diberikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 25 Oktober 2012. Sebagai upaya pemerintah dalam mendekatkan pembangunan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Sejalan dengan upaya tersebut, otonomi daerah dipandang sebagai pendorong untuk meningkatkan ekonomi lokal dan pada saat yang sama dapat memperkuat ekonomi nasional. Dengan otonomi ini, setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan serta memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di wilayahnya (Dadang, 2020). Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki otoritas untuk mengelola setiap wilayah perlu mampu mengeksplorasi potensi dan keunggulan yang ada di masing-masing daerah. Pemerintah daerah juga harus dapat merumuskan kebijakan daerah yang sistematis dan terencana, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif (Alviansyah dan Nurhayati, 2024).

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan Provinsi hasil dari pemekaran. Provinsi Kaltara sebelum tahun 2012 masih sebagai wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pada saat terbentuknya wilayah Kaltara berasal dari sebagian wilayah di Provinsi (Kaltim) yang memiliki cakupan 5 wilayah administrasi, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Di sisi lain, struktur demografis memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Potensi wilayah dapat dipengaruhi oleh struktur demografis, yang mana jumlah dan komposisi penduduk dapat menentukan kemana arah dan laju pertumbuhan ekonomi. Tabel 1.1 memberikan data jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebelum adanya pemekaran wilayah, mencakup periode 2005-2009.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2005-2009 (Jiwa)**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Pasir	174.420	177.910	180.986	182.745	<b>184.402</b>
Kutai Barat	151.227	154.345	157.847	159.852	<b>161.778</b>
Kutai	491.607	505.380	518.722	528.702	<b>538.529</b>
Kartanegara					
Kutai Timur	174.018	179.864	186.726	191.728	<b>196.738</b>
Berau	148.437	156.889	163.309	169.793	<b>176.422</b>
Penajam Paser	120.508	122.146	125.106	126.354	<b>127.532</b>
Utara					
Mahakam Ulu	-	-	-	-	-
Balikpapan	469.884	485.997	497.168	506.915	<b>516.522</b>
Samarinda	574.439	587.744	597.075	603.389	<b>609.380</b>
Bontang	120.348	125.187	130.064	134.027	<b>138.021</b>
*Malinau	49.517	52.281	56.107	59.200	<b>62.423</b>
*Bulungan	101.980	105.861	110.978	114.756	<b>118.587</b>
*Tana Tidung	-	-	-	-	-
*Nunukan	109.773	116.553	125.421	132.886	<b>140.707</b>
*Tarakan	155.716	166.231	175.291	184.353	<b>193.759</b>

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sebelum terjadinya pemekaran menjadi Kalimantan Utara pada periode 2005 hingga 2009, dapat dilihat adanya keberagaman jumlah penduduk di setiap wilayah. Wilayah yang ditandai dengan bintang saat ini sebagai bagian dari Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan, menunjukkan tren pertumbuhan penduduk.

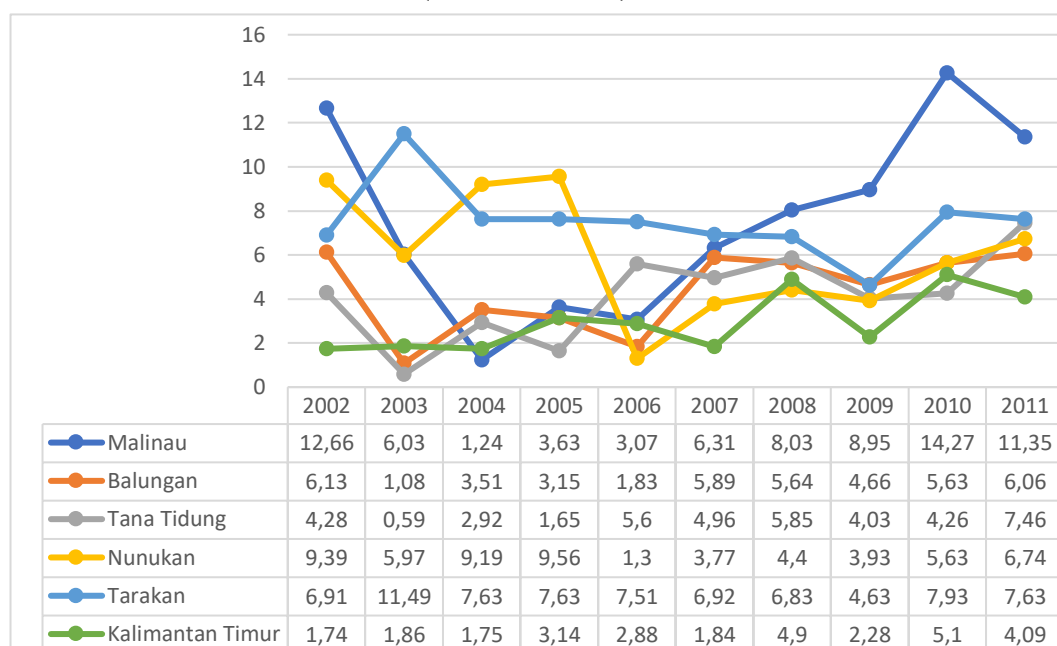
Kota Tarakan memiliki jumlah penduduk tertinggi di antara wilayah yang akan menjadi Kalimantan Utara. Pada tahun 2005, jumlah penduduknya tercatat sebanyak 155.716 jiwa dan terjadi peningkatan hingga mencapai 193.759 jiwa pada tahun 2009. Kabupaten Nunukan menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil. Jumlah penduduknya meningkat pada tahun 2005 dari 109.773 jiwa menjadi 140.707 jiwa pada tahun 2009. Kabupaten Bulungan, merupakan salah satu kabupaten utama, memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat pada tahun 2005 dari 101.980 jiwa menjadi 118.587 jiwa pada tahun 2009. Kabupaten Malinau mengalami peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2005 dari 49.517 jiwa menjadi 62.423 jiwa pada tahun 2009. Sementara, Kabupaten Tana Tidung, yang merupakan kabupaten baru dibentuk pada tahun 2007, belum memiliki data jumlah penduduk pada awal periode (2005-2006). Namun, tidak tersedia data pada BPS pada tahun 2007 hingga 2009, yang menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk.

Keseluruhan data ini menunjukkan wilayah-wilayah yang kini menjadi Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi demografis yang dapat dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sesudah pemekaran. Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah ini juga menggambarkan dinamika sosial-ekonomi yang

sesuai dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui perubahan laju pertumbuhan ekonomi, yang biasanya disajikan dalam bentuk Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. Ini merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya yang dinyatakan dalam persentase.

**Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Sebelum Pemekaran Wilayah Periode Tahun 2002-2011 (Dalam Persen)**



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.2 menunjukkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebelum pemekaran selama periode tahun 2002-2011. Pada data, terlihat Kabupaten Malinau mencatat pertumbuhan PDRB yang paling tinggi di awal periode, terutama pada tahun 2002 mencapai

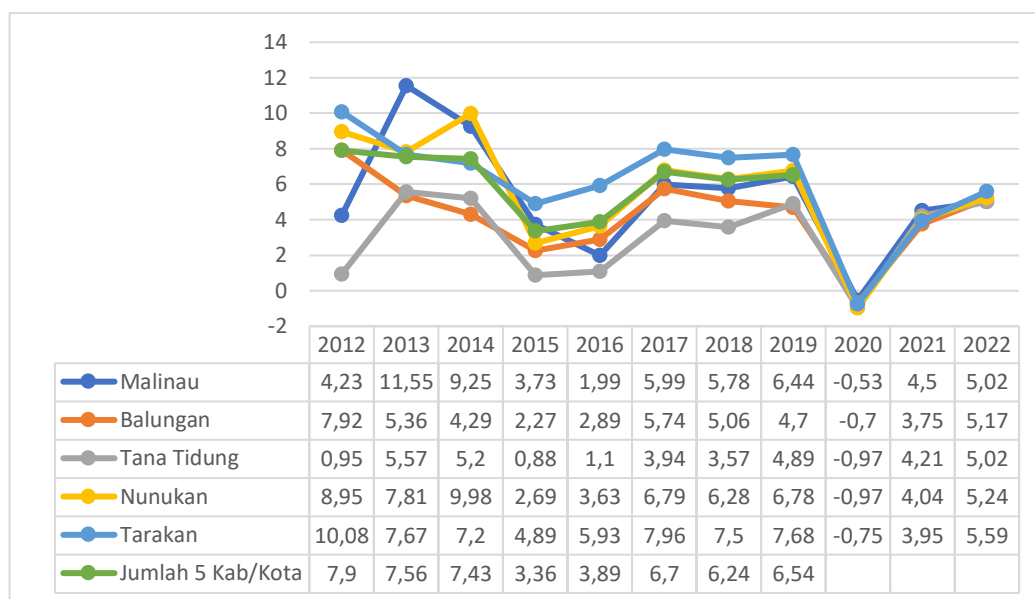
12,66% dan melonjak tajam pada tahun 2010 mencapai 14,27%, sebelum sedikit mengalami penurunan menjadi 11,35% pada tahun 2011. Kabupaten Bulungan menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil, meskipun sempat mengalami penurunan di awal periode, namun kemudian terdapat peningkatan di tahun 2007 dan stabil di kisaran 5-6% pada akhir periode.

Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan memperlihatkan laju pertumbuhan yang cenderung rendah dan stabil, meskipun kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2011 sebesar 7,46%. Sedangkan Nunukan sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2006 sebesar 1,3%, namun dapat kembali mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Kota Tarakan menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi, dengan mengalami sedikit lonjakan pada tahun 2003 mencapai angka 11,49%, namun mengalami penurunan sekitar 6% pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur keseluruhannya berada di angka yang lebih rendah, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 2-5% per tahun, serta memiliki angka pertumbuhan tertinggi sebesar 5,1% di tahun 2010.

Dari data ini terdapat disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, sedangkan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan cenderung memiliki pertumbuhan yang rendah. Grafik ini memberikan gambaran dinamika pembangunan ekonomi yang beragam. Masing-masing daerah menunjukkan karakteristik pertumbuhan yang berbeda, memberikan gambaran struktur ekonomi dan potensi pembangunan yang berbeda.



**Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Sesudah Pemekaran Wilayah Periode Tahun 2012-2022 (Dalam Persen)**



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara, 2025

Berdasarkan Grafik 1.3, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara pada periode 2012-2020 menunjukkan pola fluktuatif. Pada periode awal, sebagian besar wilayah mengalami pertumbuhan yang tinggi, seperti Kabupaten Malinau pada tahun 2013 mencapai 11,55%, Kabupaten Nunukan pada tahun 2014 sebesar 9,98%, dan Kota Tarakan pada tahun 2012 sebesar 10,08%. Namun, sesudah tahun 2014, laju pertumbuhan cenderung menurun dan stabil berkisar 2-7%, dengan penurunan tajam pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, mengakibatkan semua daerah mencatat pertumbuhan negatif atau sangat rendah, misalnya Kabupaten Manilau sebesar -0,53% dan Kabupaten Bulungan sebesar -0,7%. Sesudah tahun 2020, seluruh kabupaten/kota kembali menunjukkan pertumbuhan positif, meski belum setinggi awal periode.

Kabupaten Tana Tidung mencatat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan daerah lain, meskipun menunjukkan perbaikan bertahap sesudah tahun 2020. Pola ini menunjukkan bahwa sesudah pemekaran, terjadi perbedaan kecepatan pemulihan dan pertumbuhan antarwilayah, memberikan gambaran kapasitas ekonomi daerah yang berbeda-beda dalam merespons dinamika eksternal seperti pandemi maupun kondisi ekonomi makro nasional.

Data ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, sebagian besar wilayah di Kalimantan Utara mampu bangkit dan menunjukkan pemulihan ekonomi pasca penurunan. Pemulihan tidak hanya mencerminkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai peluang untuk mengindikasikan dan mengoptimalkan struktur ekonomi di wilayah tersebut.

Struktur ekonomi yang mencakup sektor-sektor yang dominan, kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB, serta keterkaitan antar sektor, merupakan indikator penting dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah. Penelitian oleh Nahwan (2023) yang menunjukkan bahwa transformasi Kota Bandung dalam beberapa dekade terakhir, di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menggeser struktur ekonomi Kota Bandung. Bandung sebelumnya dikenal sebagai kawasan dengan basis pertanian dan manufaktur, saat ini Kota Bandung berkembang menjadi pusat ekonomi modern yang mengutamakan sektor jasa dan teknologi.

Pemekaran wilayah dapat membawa perubahan pada struktur ekonomi suatu daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masan and Nuryadin (2020) menunjukan bahwa pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Hulu

Sungai Utara dengan terbentuknya Kabupaten Balangan yang merupakan kabupaten baru telah memengaruhi struktur ekonomi kedua daerah tersebut, baik di kabupaten induk maupun kabupaten hasil pemekaran, dengan pergeseran dari sektor primer menuju sektor sekunder. Selain itu, secara keseluruhan, pemekaran ini memberikan keuntungan lebih besar bagi Kabupaten Balangan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian oleh Sunoto, Indraswanti and Tarsilohadi (2020) menyatakan sesudah pemekaran wilayah, tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten induk di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan, yaitu berkisar antara 4,97% hingga 5,87%, lebih tinggi dibandingkan sebelum pemekaran yang berada di kisaran 2,80% sampai 4,80%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu justru menurun dari 4,15% menjadi 3,26%. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tidak menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di kabupaten induk, namun memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonominya. Selain itu, terjadi pergeseran struktur ekonomi di kabupaten induk, di mana sebelum pemekaran sektor primer mendominasi, sesudah pemekaran peran sektor ekonomi bergeser ke sektor sekunder dan tersier dengan lebih banyak sektor unggulan yang berkembang.

Pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu sekaligus mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang lebih berkelanjutan. Namun, efektivitas pemekaran dalam mengubah struktur ekonomi Kaltara masih memerlukan kajian mendalam, mengingat setiap wilayah memiliki keunggulan dan keterbatasan

ekonomi yang berbeda-beda. Potensi ekonomi antar daerah tidak sama karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti letak geografis, kekayaan sumber daya alam, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, strategi pemekaran harus mempertimbangkan karakteristik dan potensi yang dimiliki di setiap daerah, sehingga strategi pengembangan ekonomi yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang fenomena penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai pembahasan penelitian yang berjudul **"Analisis Potensi Sektor Ekonomi Kabupaten Malinau, Bulungan, Tana Tidung, Nunukan, dan Kota Tarakan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka di dapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Utara periode sebelum pemekaran (2007 – 2011) dan periode sesudah pemekaran (2013 – 2017)?
2. Bagaimana kontribusi sektor, daya saing, dan perubahan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara periode sebelum pemekaran (2007 – 2011) dan periode sesudah pemekaran (2013 – 2017)?
3. Bagaimana klasifikasi ekonomi Provinsi Kalimantan Utara periode sebelum pemekaran (2007 – 2011) dan periode sesudah pemekaran (2013 – 2017)?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Utara periode sebelum pemekaran (2007 – 2011) dan periode sesudah pemekaran (2013 – 2017).
2. Untuk mengetahui kontribusi sektor, daya saing, dan perubahan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara periode sebelum pemekaran (2007 – 2011) dan periode sesudah pemekaran (2013 – 2017).
3. Untuk mengetahui klasifikasi ekonomi Provinsi Kalimantan Utara periode sebelum pemekaran (2007 – 2011) dan periode sesudah pemekaran (2013 – 2017).

### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis struktur ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran di wilayah yang kini menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini mencakup lima wilayah administratif utama, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara serta bersumber dari buku-buku, jurnal, literatur, bacaan ilmiah, dan penelitian terdahulu. Dalam mencapai tujuan penelitian, maka penggunaan metode Location Quotient (LQ) untuk mengetahui potensi sektor-sektor unggulan, analisis Shift-Share untuk mengetahui perubahan

struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat perekonomian lebih tinggi, sedangkan untuk mengetahui klasifikasi ekonomi menggunakan metode analisis Tipologi Klassen.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah daerah, hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan yang mengenai dinamika ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan memahami perubahan struktur ekonomi, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, memberikan alokasi sumber daya dengan efisien, dan menentukan sektor prioritas mana yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Data mengenai sektor-sektor yang mengalami pergeseran dapat membantu pemerintah dalam merancang program-program untuk mendukung sektor-sektor yang terancam atau kurang berkembang.
2. Bagi investor dan pelaku usaha, penelitian ini memberi gambaran mengenai potensi dan daya saing sektor-sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan mengetahui kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian di wilayah tersebut, maka investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal penempatan investasi. Hal tersebut memungkinkan para investor untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang menjanjikan dan meminimalkan risiko investasi.
3. Bagi masyarakat lokal, penelitian ini dapat sebagai pedoman untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi. Dengan memahami sektor-sektor unggulan dan perubahan yang terjadi, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan

kebutuhan pasar. Hal tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.